

**INDEPENDENSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM
DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekalongan)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Oleh :
Triyo Jatmiko

NIM : MH.15.27.1915

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

**INDEPENDENSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM
DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekalongan)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Triyo Jatmiko

NIM : MH.15.27.1915

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2017

**INDEPENDENSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM
DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekalongan)**

TESIS


Oleh :

Triyo Jatmiko

NIM : MH.15.27.1915

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui Oleh
Pembimbing I

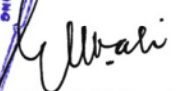

Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE, Akt, M.Hum
NIDN. 06-0503-6205

Pembimbing II


Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.,MH.
NIDN. 00-1309-5501



Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

**INDEPENDENSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM
DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekalongan)**

TESIS

Oleh :

Triyo Jatmiko

NIM : MH.15.27.1915

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal, 17 Maret 2017
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn.

NIDN. 06-2102-7401

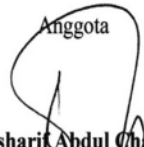
Anggota



Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum

NIDN. 06-0503-6205

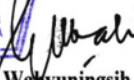
Anggota



Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH, MH.

NIDN. 00-1309/5501

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanagn di bawah ini :

Nama : TRIYO JATMIKO

NIM : MH. 15.27.1915

Alamat : Jl. Wiranata Indah II No. A1 Kec. Kedungwuni Kab.
Pekalongan

Judul Tesis : Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pedoman Tuntutan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekalongan)

Dengan ini meyakini bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Sultan Agung maupun di Perguruan Tinggi lain,
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing,
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan di cantumkan dalam daftar pustaka,
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.



Semarang, Februari 2017
Yang membuat Pernyataan



TRIYO JATMIKO
MH. 15.27.1915

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

-  *Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)*
-  *Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba – Jim Goodwin*

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- ♥ Allah SWT. Sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- ♥ Untuk istriku Asrida Savitri dan anak-anakku M. Deka Xavian Pradana dan Naraya Shekila Khairin yang selalu memberikan motivasi.
- ♥ Almamaterku.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pedoman Tuntutan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan) mengandung makna bahwa penentuan berat ringannya tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan tugas dan wewenang JPU, bukan tugas dan wewenang lembaga kejaksaan. Pengamatan penulis terhadap pelaksanaan penuntutan pidana yang dilakukan oleh JPU di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menunjukkan, bahwa penentuan tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa **Hendra Harnowo Bin Arif Budiman** Nomor Perkara : PDM 84/Pekal/Euh.2/12/2015 bukan berada di tangan JPU, melainkan berada di tangan pimpinan kejaksaan, bahkan berada di tangan Jaksa Tinggi, sementara JPU hanya berhak mengajukan usul kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Berdasarkan usul JPU, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan usul lagi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Praktik penentuan tuntutan pidana di kejaksaan di atas didasarkan pada Rencana Tuntutan Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, sementara data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan, Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan sistematisasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan derkriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian menerangkan dengan adanya kebijakan rentut, maka kemandirian Jaksa sebagai penuntut umum menjadi tidak bebas dan mandiri, sebaiknya dimasa yang akan datang Jaksa bisa mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga perlu dilakukan perubahan tentang prosedur dan mekanisme kebijakan rentut serta meningkatkan kualitas maupun integritas dari Jaksa sehingga akan terbentuk pribadi Jaksa yang profesional dan bertanggungjawab.

Kata kunci : Independensi, Jaksa Penuntut Umum, Pedoman Tuntutan Pidana

ABSTRACT

This thesis discusses about the independence of the Attorney As Public Prosecutor Criminal Charges In Implementation Guidelines (Case Study In State Attorney Pekalongan) implies that the determination of the severity of the criminal charges that will be imposed on the accused is the duty and authority of the prosecutor, not the prosecutor's duties and authority institutions. Observation of the author of the exercise of criminal prosecutions conducted by the prosecutor in the State Attorney Pekalongan show, that the determination of criminal charges against Narcotics criminal case on behalf of the defendant Hendra Bin Arif Budiman Harnowo Case Number: PDM 84 / Pekal / Euh.2 / 12/2015 is not in the hands of the prosecutor, but in the hands of the leadership of the prosecutor's office, even in the hands of Attorney General, while the prosecutor is only entitled to submit proposals to the Chief State Prosecutor. Under the proposal the prosecutor, Chief State Prosecutor proposed again to the Chief Prosecutor. The practice of criminal charges in the prosecutor's determination above is based on Criminal Charges Plan. This study uses normative juridical approach, the analytical descriptive research specifications, while the data used are primary data and secondary data obtained through the method of data collection techniques literature study, After the data is collected, it is processed by editing and systematization. Further analysis using analytical derkriptif, namely search and find relationships between data obtained from the research literature with the existing theoretical basis and used, thus providing constructive depiction of the problems studied. Based on the results of research and discussion, then drafted the following conclusion: The results explained by the policy rentut, the independence of the Prosecutor as a public prosecutor is not free and independent, should future prosecutor to be independent in carrying out its duties and authorities, so that necessary changes procedures and mechanisms rentut policy as well as improving the quality and integrity of prosecutors that will form a private attorney professional and responsible.

Keywords: Independence, Prosecution, Code of Criminal Charges

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Pedoman Tuntutan Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekalongan)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Pembimbing Tesis I.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn, selaku Ketua Penguji tesis.
5. Bapak Drs. Munsyarif Abdul Chalim, SH, MH selaku Pembimbing II.
6. Bapak Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Mahatma Sentanu, SH, MH, Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan yang berkenan memberikan ijin melanjutkan pendidikan dan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Pekalongan.
8. Orang tua, isteri, dan anak tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Semarang, Maret 2017

Penulis,

TRIYO JATMIKO
NIM: MH.15.27.1915